



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

OCHA RAHMADIYANTI

01770423206

**JURUSAN DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIFKASIM
RIAU
PEKANBARU
2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

NAMA : OCHA RAMADIYANTI

NIM : 01770423206

FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JURURSAN : DIPLOMA III AKUNTANSI

JUDUL : ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI BASIS
AKRUAL PADA DINAS KESEHATAN KOTA
DUMAI

Disetujui

Dosen Pembimbing

Dr. Dony Martias SE, MM

NIP. 19760306 200710 1 004

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi



Dr. Des H. Muh. Said HM, M.Ag.MM

NIP. 19620512 198903 1 003

Faiza Mukhlis, SE, M.Si.Ak

NIP. 19741108 200003 2 004

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

NAMA : OCHA RAMADYANTI
NIM : 01770423206
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : DIPLOMA III AKUNTANSI
JUDUL : **ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI BASIS
AKRUAL PADA DINAS KESEHATAN KOTA
DUMAI**
HARI/TANGGAL : JUM'AT, 03 JULI 2020

PANITIA PENGUJI

KETUA



Nasrullah Diamil, SE, M.Si, Ak, CA

NIP. 19780808 200710 1 003

ANGGOTA

PENGUJI I



Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak, CA

NIP. 19791010 200710 2 011

PENGUJI II



Aras Aira, SE, M.Ak

NIP. 130 411 020



ABSTRAK

Analisis Implementasi Akuntansi Basis Akrual Pada Laporan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai oleh: Ocha Rahmadiyanti

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasikan Akuntansi Basis Akrual Pada laporan Keuangan yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan pada SKPD Dinas Kesehatan Kota Dumai dan apa kendala yang ditimbulkan pada penyajian laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kota Dumai. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengimplentasian akuntansi basis akrual tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pencatatan jurnal Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Retribusi pemakaian kekayaan daerah seharusnya pencatatan jurnal sesuai aturan yang berlaku Piutang Retribusi Pemakain Kekayaan Daerah pada Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Akibat dari kesalahan pencatatan tersebut, maka Laporan Realisasi Anggarannya menjadi tidak wajar, dan dalam menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Dumai belum disajikan secara rinci pada setiap pos-pos atau akun-akun dalam Laporan Keungan Dinas Kesehatan Kota Dumai. Akibatnya, Dinas Kesehatan Kota Dumai menyajikan CALK secara tidak lengkap, maka banyak informasi-informasi dan penjelasan-penjelasan yang tidak jelas

Kata kunci **Implementasi** Standar Akuntansi Pemerintahan, Basis Akrual, Laporan Keuangan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya yang dilimpahkan kepada penulis serta Ridho dari-Nyalah sehingga penulis diberi kekuatan dan keselamatan untuk berjalan walau tertatih-tatih dalam menyelesaikan laporan ini. Tak lupa pula shalawat beriring salam dikirimkan buat junjungan alam yakni nabi Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Dengan ini penulis telah menyelesaikan laporan sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan memperoleh gelar ahli madya yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI BASIS AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI”**. Laporan akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. Dalam laporan akhir ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis. Ananda persembahkan yang teramat bahagia ayahanda Asriadi dan Ibunda Heryanti yang selama ini mendidik dan membimbing penulis serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis sehingga terselesainya laporan ini. Selain itu penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Teristimewa ayahanda Asriadi dan Ibunda Heryanti yang sangat kucintai dan kusayangi yang telah memberi kasih sayang dan do'anya dengan tulus, perhatian, semangat, serta dorongan demi kesuksesan anak-anaknya.
 2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.A.G selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
 4. Ibu Dr. Leny Nofianti, M.S., S.E, M.Si, Ak selaku pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
 5. Ibu Dr. Hj. Julina, S.E, M.Si selaku pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
 6. Bapak Dr. Amrul Muzam, SHI, MA selaku pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
 7. Ibu Faiza Muklis, S.E, M.Si, Ak selaku ketua jurusan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
 8. Ibu Febri Rahmi, S.E, M.Sc., Ak selaku sekretaris jurusan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
 9. Dr. Dony Martias, S.E, MM sebagai dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan petunjuk dan masukan serta meluangkan waktu untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

10. Bapak dan Ibu Dosen yang banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan. Bapak dan Ibu Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
11. Pengelola Dinas Kesehatan Kota Dumai yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis selama melakukan penelitian.
12. Ucapan terima kasih banyak untuk nenek dan kakek, paman-paman serta bibik-bibik yang telah memberikan kasih sayang dan motivasi sehingga adinda dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Buat teman-temanku, Agnes, Tina, Dinda, Herlin, Retno, Ferdi dan seluruh temen-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas hari-hari selama kita menjalankan perkuliahan. Penulis menyadari sepenuhnya tugas takhir ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi tata, tehnik penulisan maupun bentuk ilmiahnya. Hal ini bukan karena disengaja tetapi karena kurangnya keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis kuasai. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik yang sehat dari pembaca. Akhirnya penulis hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin amin ya robbal 'alamin.

Pekanbaru, Mei 2020

OCHA RAHMADIYANTI

01770423206



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Sipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Berdirinya Dinas Kesehatan Kota Dumai.....	10
B. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Dumai	10
C. Tujuan dan Sasaran	10
D. Struktur Organisasi Unit Kerja	12
E. Job Description.....	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
A. TinjauanTeori.....	18
1. Pengertian Akuntansi Basis Akrua.....	18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BABIV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
A. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	65



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Pemerintah Daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya keleluasaan dalam mobilisasi sumberdana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Basis akuntansi pada sektor publik atau sektor pemerintahan sampai dengan akhir tahun 2014 menggunakan dasar pencatatan akuntansi kas menuju akrual atau yang disebut CTA (*cash toward accrual*). Mulai Januari 2015 semua entitas diwajibkan menerapkan basis akrual sebagai dasar pencatatan laporan keuangan dengan mengacu Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dengan maksud memberikan manfaat lebih bagi para pemangku kepentingan.

Penyusunan laporan keuangan bagi entitas pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota selain berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam PP No. 71 tahun 2010 juga mengacu pedoman kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Masing-masing Kepala daerah mempunyai kewenangan mengatur dan menyusun kebijakan akuntansi yang berlaku di daerahnya dengan mengacu pada PP No 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007.

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara atau daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*realible*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA). selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya berupa Laporan Keuangan.

Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (*accounting entity*) pada dasarnya untuk mewujudkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Kertas Kerja atau Laporan Keuangan oleh SKPD ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Implementasi akuntansi berbasis akrual membutuhkan sistem baru dan pelatihan yang tepat karena akuntansi berbasis akrual lebih kompleks jika dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Selain itu juga membutuhkan penggunaan pertimbangan yang lebih tinggi, oleh sebab itu banyak perubahan paradigma yang dibutuhkan terutama dari pegawai akuntansi yang secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Langsung terlibat pada pelaporan akuntansi. Pegawai harus mendapatkan pengetahuan informasi akuntansi berbasis akrual secara penuh guna memahami konsep akuntansi pemerintahan selama periode implementasi.

Pada penelitian yang dilakukan peneliti menemukan dua permasalahan dalam pencatatan akuntansi akrual dan penyusunan Laporan Keuangan:

Masalah pertama, terkait dengan kesalahan pencatatan pada transaksi yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2019, Dinas Kesehatan Kota Dumai seharusnya sudah menerima Pendapatan Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp21.055.000,-. Namun Dinas Kesehatan Kota Dumai belum menerima sampai pada tanggal 31 Desember 2019. Dinas Kesehatan Dumai membuat jurnal pencatatan (D) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air dan (K) *Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air – LO*, data terlampir.

Seharusnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam akuntansi berbasis akrual jurnal pencatatan seharusnya adalah (D) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air dan (K) *Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akibat dari kesalahan pencatatan tersebut, maka Laporan Realisasi Anggarannya menjadi tidak wajar, karena ada kesalahan pada perkiraan *Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air – LO* yang menjadi terlalu tinggi dan perkiraan *Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas* menjadi terlalu rendah.

Masalah kedua terkait dengan penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Kesehatan Dumai. Dalam laporan keuangan yang disajikan, Dinas Kesehatan Dumai tidak menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan secara lengkap. Seharusnya dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Lampiran 1.05 PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan No.58 dinyatakan bahwa harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atau atas laporan keuangan seperti kewajiban kontigensi dan komitmen lainnya. Akibatnya, Dinas Kesehatan Kota Dumai menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) secara tidak lengkap, maka banyak informasi-informasi dan penjelasan-penjelasan yang tidak jelas perhitungannya karena informasi tentang penjelasan atau daftar terinci dan analisis atas nilai suatu perkiraan yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Dumai sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dari Latar Belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dan mengangkatnya dalam bentuk Tugas Akhir dengan Judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI BASIS AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi basis akrual yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan) pada SKPD Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam menyajikan Laporan Keuangan ?
2. Apa kendala yang ditimbulkan pada penyajian laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kota Dumai ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi basis akrual yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan pada SKPD Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam menyajikan Laporan Keuangan.

- b. Untuk mengetahui kendala yang timbul pada penyajian laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kota Dumai.

Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkannya, antara lain ada sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah pengetahuan khususnya tentang pencatatan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- b. Bagi Instansi

Sebagai bahan pertimbangan dalam hal pencatatan keuangan.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat disajikan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Dumai, Jl. Tuanku Tambusai Bagan Besar – Dumai.

Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini berupa :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Kantor Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam bentuk sudah jadi yang diperoleh dari pimpinan dan pihak lain-lain intern dari Kantor Dinas Kesehatan Kota Dumai.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dan disajikan oleh dari Kantor Dinas Kesehatan Kota Dumai yang sudah jadi seperti sejarah umum dan struktur organisasi, deskripsi jabatan dan pembagian masing-masing tugas dan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dapat dibedakan atas 3 bagian.

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai karyawan kantor dari Kantor Dinas Kesehatan Kota Dumai untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir.
- b. Dokumentasi, yaitu dengan mengutip data secara langsung yang dimiliki oleh dari Kantor Dinas Kesehatan Kota Dumai seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- c. Penelitian pustaka merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pengumpulan data, pembahasan yang diambil dari literatur-literatur



bantuan studi dan sumber lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

E Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Laporan ini penulis menggunakan system penulisan yang terbagi dalam 4 bab yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis akan membahas gambaran umum mengenai keadaan perusahaan seperti sejarah dari Kantor Dinas Kesehatan Kota Dumai, struktur organisasi, visi misi dan uraian tugas structural instansi.

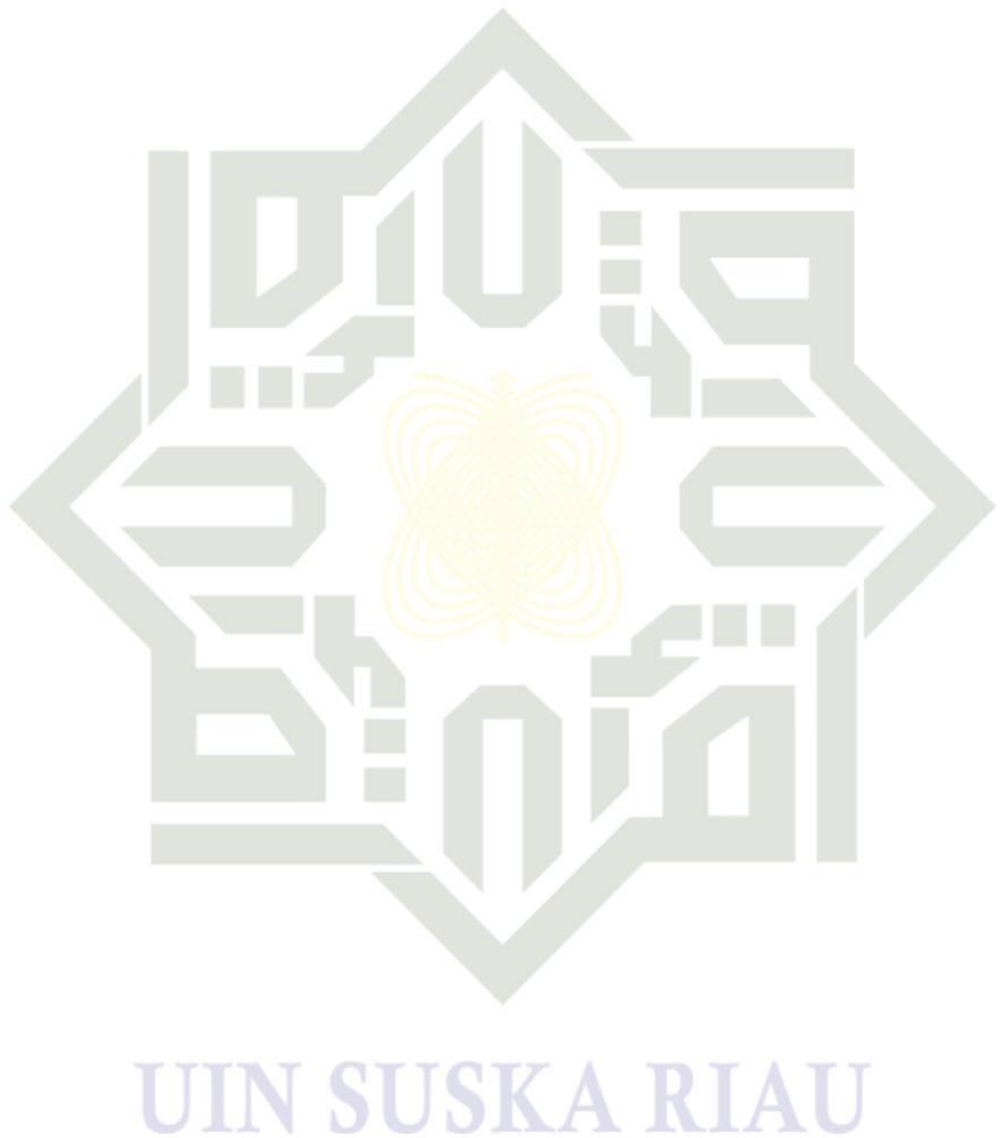
BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis akan menguraikan teori yang terkait dengan judul penelitian yang penulis bahas.

BAB IV

: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya Dinas Kesehatan Kota Dumai

Sejalan dengan peningkatan status Kota Dumai menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II, maka akan meningkat pula tuntutan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah ini sesuai dinamika dan perkembangan pembangunan yang ada maka di bentuklah Dinas Kesehatan Kota Dumai sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 717 tanggal 22 Mei 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.

B. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Dumai

a. Visi Dinas Kesehatan Kota Dumai

Adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT DUMAI YANG MAKMUR DAN MADANI “

b. Misi Dinas Kesehatan Kota Dumai

Adalah “Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing”

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan kesehatan Kota Dumai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terciptanya manajemen kesehatan yang akuntabel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan perilaku masyarakat yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan deajat kesehatan.
2. Pencegahan terhadap penyakit menular dan menurunkan angka kesakitan, kematian serta kecacatan akibat penyakit menular.
3. Meningkatnya jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan penggunaan obat rasional melalui pelayanan kemarfasian yang berkualitas.
4. Meningkatnya pelayanan gizi dan penyebaran tenaga kesehatan, serta ketersediaan sarana prasarana dan dukungan logistic yang merata, terjangkau dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
5. Terlindungnya masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan kesalahan obat, napza, serta bahan berbahaya lainnya.
6. Peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan, serta ketersediaan sarana prasarana dan dukungan logistic yang merata, terjangkau dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
7. Tersedianya masukan dan rekomendasi bagi pengembangan program pembangunan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu serta jaringan System Informasi Kesehatan (SIK) untuk mendorong pengembangan standard an mutu pelayanan kesehatan.

Sasaran Pembangunan Kesehatan Kota Dumai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terkendalinya kejadian mortalitas (angka kematian).
2. Terkendalinya kejadian morbiditas (angka kesakitan).
3. Meningkatnya status gizi balita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan target sasaran indicator Kinerja Utama Kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Terkendalinya kejadian mortalitas, indicator kinerjanya meliputi:
 - a. Menurunnya Angka Kematian bayi menjadi 22 pr 1.000 kelahiran hidup.
 - b. Menurunnya Angka kematian balita menjadi 30 per 1.000 kelahiran hidup.
 - c. Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan menjadi 115 per 100.000 kelahiran hidup.
 - d. Meningkatnya Angka harapan hidup waktu lahir menjadi 71 tahun.
2. Terkendalinya kejadian morbiditas, indicator kinerjanya meliputi:
 - a. Menurunnya Angka Kesakitan malaria menjadi 1 per 1.000 penduduk.
 - b. Meningkatnya Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + menjadi 88%.
 - c. Menurunnya prevalansi penderita HIV terhadap penduduk beresiko menjadi < 1%.
 - d. Menurunnya Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi 57 per 100.000 penduduk.
3. Meningkatkan status gizi balita, indicator kinerjanya meliputi:
 - a. Menurunnya persentase balita dengan gizi buruk menjadi < 2%
 - b. Menurunnya persentase balita dengan gizi kurang menjadi < 6%

D. Struktur Organisasi Unit Kerja

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 tahun 2016 yang terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

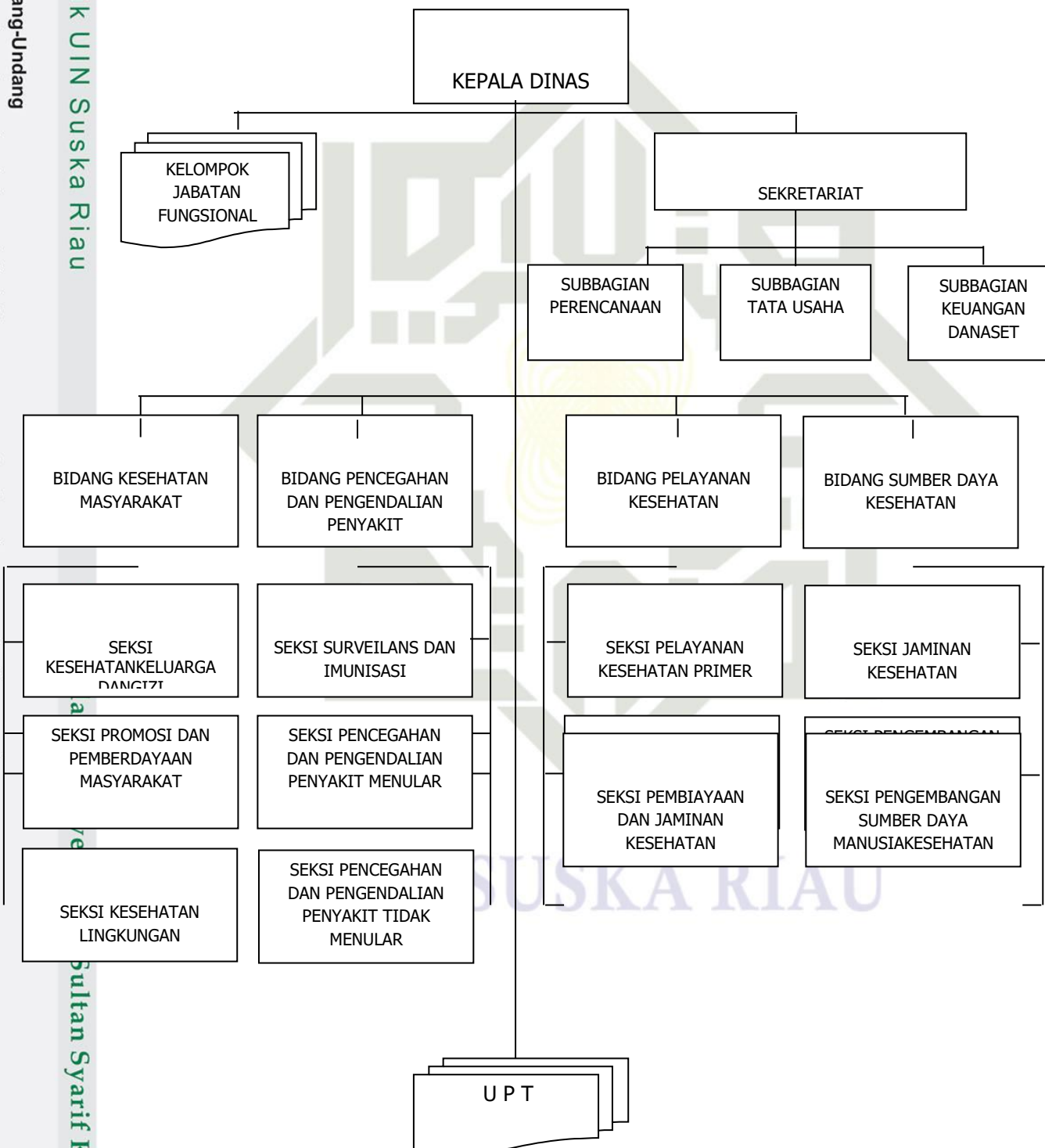
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Kepala Dinas
- Sekretariat
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Tata Usaha
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset
- Bidang Kesehatan Masyarakat
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi
 - b. Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan
4. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
 - a. Seksi Surveilans Dan Imunisasi
 - b. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular
 - c. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - c. Seksi Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - a. Seksi Farmasi Dan Alat Kesehatan
 - b. Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
 - a. Puskesmas

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Uraian Tugas (*job description*) Bagian/Unit Kerja Tempat Pelaksanaan PKL

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Uraian tugas Kepala Dinas, sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis dan operasional dibidang kesehatan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dengan instansi terkait;
- d. mengoordinasikan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan;
- e. mengevaluasi setiap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan secara periodik; dan
- f. menyiapkan bahan tugas-tuags lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan bidang kesehatan.

2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. pengoordinasian dan menyusun rencana, program dan anggaran Dinas Kesehatan;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Kesehatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. penataan organisasi dan tata laksana;
- g. pengoordinasian dan menyusun peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.

3. *Subbagian Keuangan dan Aset, sebagai berikut:*

- a. Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
- b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
- c. Menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
- d. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
- e. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program; dan
- h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam mengimplementasikan basis akrual dalam pencatatan jurnal Piutang seharusnya sudah menerima Pendapatan Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah. Namun Dinas Kesehatan Kota Dumai belum menerima sampai pada tanggal 31 Desember 2019. Dinas Kesehatan Dumai membuat jurnal pencatatan (D) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air dan (K) *Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air – LO*, data terlampir. Seharusnya, dalam akuntansi berbasis akrual jurnal pencatatan seharusnya adalah (D) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air dan (K) *Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas*. Akibatnya, maka Laporan Realisasi Anggarannya menjadi tidak wajar, karena ada kesalahan pada perkiraan *Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air – LO* yang menjadi terlalu tinggi dan perkiraan *Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas* menjadi terlalu rendah. Maka Dinas Kesehatan Kota Dumai tidak menerapkan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Dumai tidak menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan secara lengkap. Seharusnya dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dinyatakan bahwa harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atau atas laporan keuangan seperti kewajiban kontigensi dan komitmen lainnya. Akibatnya, karena Dinas Kesehatan Dumai tidak menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) secara tidak lengkap, maka banyak informasi-informasi dan penjelasan-penjelasan yang tidak jelas perhitungannya karena informasi tentang penjelasan atau daftar terinci dan analisis atas nilai suatu perkiraan yang disajikan dalam Laporan Keuangan..

Dalam penyajian laporan keuangan Dinas Kesehatan Kota Dumai yang mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terdapat kendala-kendala. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang mengetahui atau menguasai secara penuh atau secara keseluruhan bagaimana teknik penyusunan laporan keuangan berbasis akrual karena penyusunan laporan keuangan berbasis akrual lebih sulit dibandingkan berbasis kas hal itu disebabkan oleh adanya pos-pos piutang, hutang dan penyusutan yang muncul. Ini disebabkan banyaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SDM yang belum memahami aplikasi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sehingga masih dalam tahap penyesuaian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, berikut ini penulis menyarankan kepada pihak instansi kiranya dapat mempertimbangkan dan menjadi masukan bagi instansi terutama bagi staf accounting. Dalam penyajian laporan keuangan khususnya akun piutang dan Catatan Atas Laporan Keuangan hendaklah secara wajar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan :

1. Sebaiknya, Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam mengimplementasi akuntansi berbasis akrual pada jurnal pencatatan piutang berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan seharusnya adalah (D) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air dan (K) *Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebaiknya dalam menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Dumai disajikan secara rinci pada setiap pos-pos atau akun-akun dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Dumai Sehingga menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pada Lampiran 1.05 PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan.
4. Sebaiknya Sumber Daya Manusia mempelajari dan mengikuti pelatihan agar menguasai sepenuhnya tentang akuntansi basis akrual.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Baqarah 282
- Halim, Abdul. Muhammad Syam Kusufi. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, Monika. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Poliban Press
- Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Teori Akuntansi. Edisi Revisi*. 2011. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hery. 2015. *Cara Mudah Memahami Akuntansi: Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Kieso, Donal E.. Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield. 2017. *Intermediet Accounting: IFRS Edition*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, Rendra dan Aji Dedi Mulawarman. 2016. *Inspirasi Dari Ladang: Akuntansi Pertanian Nusantara*. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Pers.
- Mujiono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak- Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: CV. ANDI
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Rejowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik; Organisasi Non Laba*. Edisi ketiga. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Riyanto dan Puji Agus. 2015. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sulistiyowati, Leny. 2010. *Panduan Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Yudiati, Wiwin dan Abdulloh Mubarak. 2017. *Kualitas Pelaporan Keuangan: Kajian Teoritis Dan Empiris*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA DUMAI DINAS KESEHATAN

Jl. Tuanku Tambusai Bagan Besar
DUMAI

Website : <http://www.dinkeskotadumai.com>

Nomor : 000/1133/DINKES
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian/Riset

Kepada Yth :
Dekan fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Suska Riau
Di -
Pekanbaru.

Dengan Hormat,

Memenuhi maksud surat saudara Nomor :Un.04/F.VII/PP.00.9/758/2020,
Tanggal 03 Februari 2020, Tentang Permohonan Izin Penelitian/Riset,
atas nama :

Nama : OCHA RAHMADIYANTI
NIM : 01770423206
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : D.III
Judul Penelitian : Analisis Implementasi Basis Akrua Pada Laporan
Keuangan Dinas Kesehatan Kota Dumai

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut sudah
Melaksanakan Penelitian/Riset di Dinas Kesehatan Kota Dumai.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebaik-
baiknya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dumai, 23 Juli 2020
Pir Kadis

Syahrulpaldi S.Sos, M.Si
196810251990021001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Mahasiswa Yang Bersangkutan
2. Arsip